



Indikator Kinerja Pelayanan Oleh Badan Layanan Umum (BLU)

Dr. Wahyudi Kumorotomo
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id
kumoro@map.ugm.ac.id

Badan Layanan Umum

“Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (penyediaan barang dan jasa) yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.”

TUJUAN:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa)
2. Menciptakan fleksibilitas berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dengan penerapan praktik bisnis yang sehat.

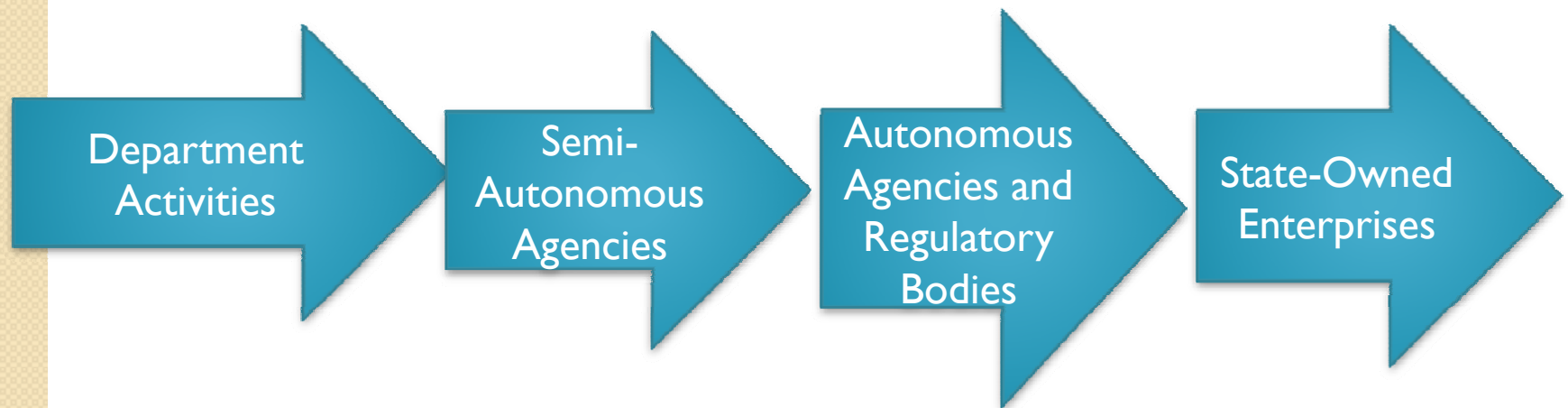
Konsep SARA

(Semi-Autonomous Revenue Authority)

Rancangan desain BLU dalam konsep internasional disebut SARA (Semi-Autonomous Revenue Authority);

“ a governance model for revenue administration where traditional ministry of finance department (tax and usually custom administration) are established as an organization or agency with a degree of autonomy from government and independence from standard public service policies” (Kidd & Crandall, 2006:5).

Typical National Government Structures (Kidd & Crandall, 2006)



Perceived Impact of SARA Model on Reform (29 Countries)

Rank	Reform Areas	Degree of Impact
1	Integrate tax administration	8.29
2	Increase tax revenues	8.11
3	Provide a catalyst or momentum for reform	8.00
4	Improve automation	7.79
5	Improve services to the public	7.53
6	Improve remuneration	7.53
7	Improve human resources regime	7.47
8	Improve compliance management	7.42
9	Improve public confidence	7.32
10	Simplify laws, regulations, procedures	7.06
11	Improve budget provision	6.89
12	Improve anti-corruption measures	6.83
13	Introduce risk management	6.76
14	Improve valuation, classification, origin	6.21
15	Introduce taxpayer segmentation	5.94
16	Introduce self-assessment	5.92



Common characteristics of SARA

- Self-financing
- Personnel schemes that are exempt from the general civil service regulations
- Politically independent management.



Tiga Wilayah Layanan BLU di Indonesia (PP 23/2005)

1. Penyediaan barang/jasa layanan: kesehatan (RS), pendidikan (perguruan tinggi), penelitian dan pengujian
2. Pengelolaan wilayah khusus: Misalnya: KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu)
3. Pengelolaan dana publik: dana bergulir UMKM, penerusan pinjaman, tabungan perumahan.



Kewajiban Dasar BLU

1. Menghitung harga pokok layanan dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan (oleh Menteri Teknis pembina)
2. Menghitung dan menyajikan anggaran sesuai layanan yang direalisasikan
3. Kontrak kinerja antara menteri dan pimpinan BLU

Tarif Layanan (ps.9 PP. 23/2005)

1. BLU dapat memungut biaya
2. Dasar perhitungan: biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana
3. Diusulkan oleh BLU, ditetapkan oleh Menkeu/Gub/Bup/Walikota
4. Pertimbangan:
 - Kontinuitas dan pengembangan layanan
 - Daya beli masyarakat
 - Azas keadilan dan kepatuhan
 - Kompetisi yang sehat.